

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari pembangunan suatu daerah yang mana daerah dapat membangun serta menggali potensi yang dimiliki disetiap wilayahnya. Provinsi Banten yang merupakan daerah pemekaran dari Provinsi Jawa Barat yang terbagi menjadi 4 (empat) Kabupaten dan 4 (empat) Kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dimana hal ini disebutkan pada UUD No.23 Tahun (2014) Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berlakunya otonomi daerah ini bertujuan untuk mewujudkannya pembangunan yang merata disetiap daerah dan untuk menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran bagi masyarakat secara adil dan merata. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dan mengoptimalkannya untuk memenuhi pembiayaan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD, salah satu sumber resmi penerimaan daerah, masih dikembangkan untuk menanggung sebagian biaya yang terkait dengan pelaksanaan operasional pembangunan yang terus berkembang, sehingga dapat dicapai otonomi dan kemandirian daerah yang baik (Hakib & Arifin, 2020).

PAD sangat membantu untuk mendanai kebutuhan daerah seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. PAD yang berkembang menunjukkan bahwa pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak pendanaan yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, sehingga tingkat kemandirian daerah juga akan meningkat dan nantinya dapat menciptakan

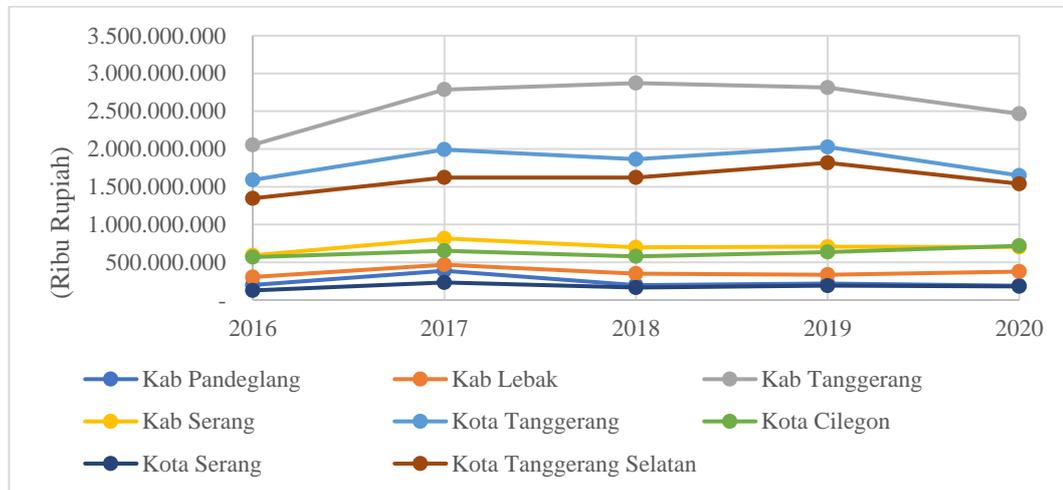
peluang bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan PAD rendah dapat menghalangi pemerintah untuk menyediakan fasilitas publik dan infrastruktur dikarenakan pengeluaran daerah yang terbatas. Kemandirian daerah akan sulit terealisasi jika pemerintah pusat menguasai mayoritas pembiayaan. Hal ini justru akan menghambat aktivitas pemerintah daerah dalam menemukan dan menumbuhkan sumber PAD saat ini, jika pemerintah pusat yang mengontrol pembiayaan maka pemerintah daerah dalam melakukan anggarannya akan menjadi lebih bergantung pada pemerintah pusat, sehingga terjadi pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan anggaran pemerintah daerah.

Menurut Rosen & Gayer (2008) Keuangan publik adalah disiplin ekonomi yang mempelajari perpajakan dan pengeluaran pemerintah, dimana pajak merupakan komponen utama dalam perumusan PAD yang mana peningkatan pajak akan berdampak positif pada peningkatan PAD dan pengeluaran pemerintah menggambarkan kebijakan pemerintah dalam penyediaan barang publik sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi bagi pembangunan daerah yang akan berdampak pada peningkatan PAD. Tinggi rendahnya penerimaan pajak bergantung pada banyaknya jumlah penduduk, dapat dinyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk memiliki dampak menguntungkan pada PAD karena akan mengubah berapa banyak orang yang membayar pajak daerah jika populasinya bertambah. Investasi memiliki dampak positif pada pendapatan suatu daerah, dapat dinyatakan bertambahnya investasi pada suatu wilayah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tingkat pendapatan perkapita di wilayah tersebut.

Provinsi Banten menghubungkan Indonesia bagian timur dengan wilayah Sumatera sebagai jalur perdagangan dan juga memiliki jalur laut yang potensial di Selat Sunda sebagai rute Internasional, tentunya sebagai penghubung perekonomian antara dua pulau tersebut akan membuat pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten bergerak pada angka yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Banten tidak serta-merta meningkatkan tingkat kemandirian Provinsi Banten dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik mencatat bahwa PAD Provinsi Banten merupakan yang terendah ke 2 di Pulau Jawa (BPS, 2020). Hal ini

menunjukkan bahwa pemerintah daerah Banten masih belum mampu memanfaatkan potensi sumber dayanya.

Grafik 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020



Sumber: DJPK Kemenkeu, 2020

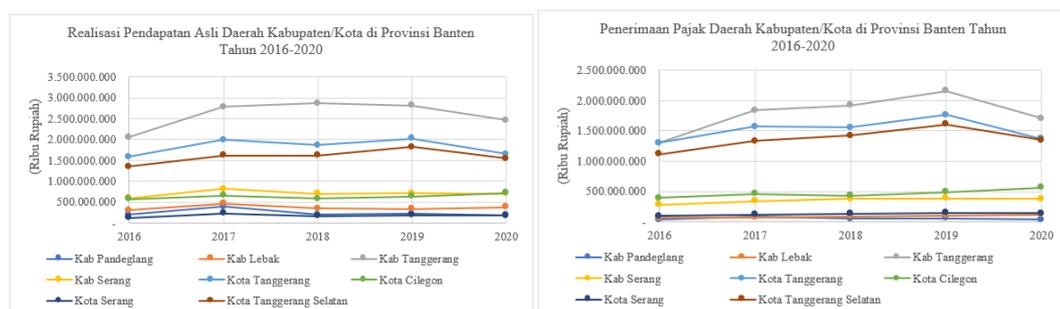
Berdasarkan grafik 1 (satu) di atas bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten terus mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan realisasi pendapatan asli daerah sebesar 3% pada Kabupaten Tangerang yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, namun di tahun yang sama terjadi penurunan hampir di seluruh Kab/Kota di Provinsi Banten. Penurunan yang signifikan terjadi pada Kabupaten Pandeglang sebesar -49%, diikuti Kota Serang sebesar -29% dan Kabupaten Lebak sebesar -25%. Penurunan tersebut terjadi karena adanya bencana gempa bumi yang berpusat pada kabupaten Lebak pada awal bulan Januari dan pada bulan Desember 2018 juga terjadi gempa diakibatkan dari aktivitas gunung berapi Krakatau hingga menyebabkan tsunami yang melanda wilayah Pandeglang (BMKG, 2018). Hal ini menyebabkan berkurangnya kunjungan wisatawan dan terhambatnya kegiatan produksi serta distribusi diakibatkan banyaknya jalan yang rusak karena tergenang air sehingga pabrik-pabrik kesulitan untuk melakukan kegiatan produksi dan distribusi yang berdampak pada penurunan penerimaan PAD.

Kemampuan pemerintah daerah membelanjakan pendapatan pajak dan retribusi untuk layanan dan infrastruktur penting diukur dengan Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah. PAD yang tinggi mencerminkan tingginya rasio kemandirian keuangan daerah dalam hal mendukung operasi pemerintahannya sendiri. Pada Provinsi Banten, rata-rata persentase Kabupaten/Kota dengan rasio kemandirian daerah sebesar 79,10%. Hanya 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, yaitu Kota Tangerang Selatan mencapai 182,39%, Kabupaten Tangerang sebesar 143,64% dan Kota Tangerang sebesar 138,96% yang memiliki tingkat kemandirian daerah di atas rata-rata. Sedangkan sisanya 5 (lima) Kab/Kota masih berada di bawah rata-rata, Kabupaten Pandeglang menjadi daerah dengan Rasio Kemandirian Daerah terendah yaitu sebesar 12,15%. Hal ini membuktikan bahwa 5 (lima) Kab/Kota di Provinsi Banten tetap mengandalkan pemerintah pusat untuk membiayai fungsi pemerintahannya (PPID Provinsi Banten, 2018).

Menurut pandangan Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, pajak, berbagai macam pungutan (*charges*), dan pinjaman dapat diklasifikasikan sebagai bentuk penerimaan pemerintah (Musgrave & Musgrave, 1993). Pajak daerah merupakan salah satu sumber penyumbang dana dalam PAD, Salah satu sumber pendanaan untuk PAD adalah pajak daerah, peningkatan pemungutan pajak daerah dapat meningkatkan pendanaan untuk pembangunan daerah, dan memungkinkan daerah tersebut dapat melaksanakan otonomi, yakni mengendalikan dan mengelola rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Grafik 2. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020



Sumber: DJPK Kemenkeu, 2020

Berdasarkan grafik 2 (dua) tercatat selama periode tahun 2016-2020 penerimaan pajak Provinsi Banten mengalami fluktuasi. Peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2019 didominasi oleh 1 (satu) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, yakni

Rifky Ramadhani, 2022

PENGARUH PAJAK DAERAH, JUMLAH PENDUDUK, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI BANTEN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

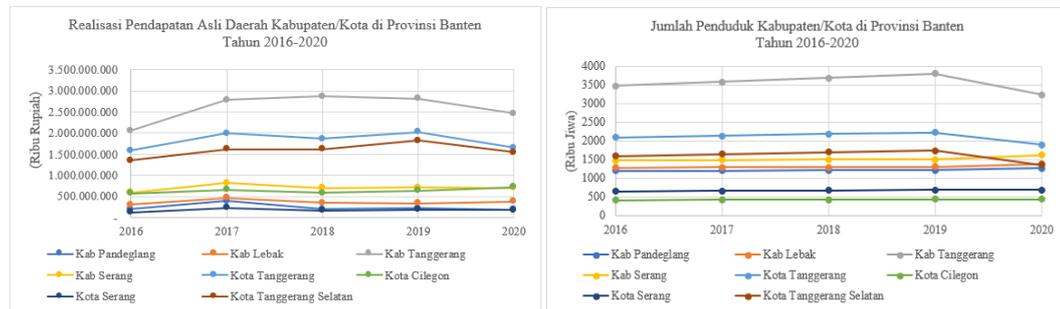
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Kabupaten Tangerang sebesar 2,153 triliun rupiah, Kota Tangerang sebesar 1,760 triliun rupiah, dan Kota Tangerang Selatan sebesar 1,603 triliun rupiah dimana pajak PBB dan BPHTB sebagai penyumbang terbesar dalam pajak daerah. Di tahun yang sama Kota Cilegon memiliki penerimaan pajak daerah sebesar 488 miliar rupiah, diikuti Kabupaten Serang sebesar 381 miliar rupiah, Kota Serang sebesar 143 miliar rupiah, Kabupaten Lebak sebesar 100,74 miliar rupiah minimnya penerimaan pajak daerah ini disebabkan karena Kabupaten Lebak didominasi oleh lapangan usaha pertanian dan perkebunan, sedangkan penerimaan pajak terendah berada pada Kabupaten Pandeglang pada tahun 2019 sebesar 37,22 miliar rupiah, hal ini terjadi karena pajak PBB merupakan penerimaan terbesar di Kabupaten Pandeglang namun baru terealisasi 0,16% dari total pagu (Kemenkeu, 2019).

Peningkatan pajak daerah berpengaruh positif dalam peningkatan penerimaan PAD. Hal tersebut berbanding terbalik pada Kabupaten Lebak yang mana terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 namun penerimaan PAD menurun, hal ini disebabkan karena sumber utama PAD pada Kabupaten Lebak adalah lain-lain PAD yang sah yang mencapai 69,02% dari realisasi PAD, dimana kenaikan penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Lebak tidak terlalu berdampak pada peningkatan penerimaan PAD (PPID Provinsi Banten, 2018).

Pertumbuhan penduduk dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Musgrave mengatakan bahwa banyaknya jumlah penduduk memberikan gambaran seberapa banyak jumlah penyetor pajak (Musgrave & Musgrave, 1993). Dengan begitu, penduduk merupakan sumber daya yang memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan pajak. Penjelasan tersebut menggambarkan banyaknya barang dan jasa yang dikonsumsi akan meningkatkan perkembangan usaha-usaha di daerah tersebut menjadi semakin baik. Ketika usaha yang semakin besar maka kuantitas pajak daerah dan retribusi yang dibayarkan kepada pemerintah akan meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan.

Grafik 3. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

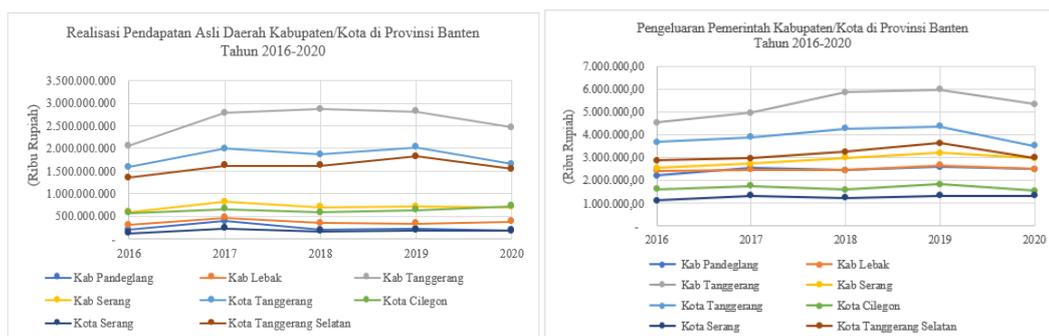
Pada grafik 3 (tiga), jumlah penduduk di Kabupaten/Kota Banten memiliki tren positif dalam peningkatan jumlah penduduk. Terjadi peningkatan jumlah penduduk pada Kabupaten/Kota pada tahun 2019, Kabupaten Tangerang sebagai yang terbesar yaitu 3,8 juta jiwa, terbesar kedua terdapat di Kota Tangerang sebesar 2,2 juta jiwa, diikuti Kota Tangerang Selatan sebesar 1,7 juta jiwa, Kabupaten Serang sebesar 1,5 juta jiwa, Kabupaten Lebak 1,3 juta jiwa, Kabupaten Pandeglang sebesar 1,2 juta jiwa, Kota Serang sebesar 688 ribu jiwa dan Kota Cilegon sebesar 437 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk banten berada di Tangerang Raya (Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang), dimana kawasan tangerang merupakan pusat industri besar/ sedang serta sebagai pusat perdagangan. Keadaan inilah yang menjadi salah satu daya tarik migran untuk datang ke wilayah Tangerang. Posisi wilayah Tangerang yang berhimpitan dengan Jakarta, juga menjadikan wilayah ini dipilih oleh para migran sebagai lokasi tempat tinggal sementara aktivitas sehari-hari yang dilakukan di Jakarta. Selain migran dari provinsi lain di pulau Jawa, angka kelahiran juga menggambarkan pertumbuhan penduduk untuk Kab/Kota lain seperti Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, dan Kota Cilegon (BPS, 2020).

Besarnya jumlah penduduk di Provinsi Banten menggambarkan banyaknya pula jumlah penyeter pajak, dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk tersebut dapat meningkatkan penerimaan PAD, namun hal tersebut berbanding sebaliknya dengan data jumlah penduduk pada Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang pada tahun 2018 yang mengalami pertumbuhan, namun

penerimaan PAD tidak meningkat. Hal ini karena populasi yang tinggi tanpa peluang ekonomi yang memadai dapat menimbulkan pengangguran, pengangguran ini tidak bisa membayar berbagai pungutan pemerintah sehingga dapat menyebabkan penurunan penerimaan PAD (Hakib & Arifin, 2020).

Insfrastuktur (*social overhead capital*) seperti jalan, jembatan dan Pelabuhan walaupun tidak secara actual berkontribusi pada produksi *output*, tetapi insfrastuktur memberikan peran penting dalam kegiatan ekonomi (Kurniawan et al., 2018). Dalam pengertian ini, pengeluaran pemerintah merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mempersiapkan barang-barang publik sebagai roda penggerak ekonomi, yang mana nantinya akan menjadi sumber pungutan pajak dan retribusi sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD.

Grafik 4. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Pada grafik 4 (empat) tersebut, dapat kita lihat bahwa pengeluaran pemerintah pada setiap kabupaten dan kota cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pengeluaran pemerintah pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi banten pada tahun 2019 mengalami peningkatan dimana kawasan Kabupaten Tangerang memiliki nilai tertinggi sebesar 5,9 triliun rupiah meningkat sebesar 1,86% dari tahun sebelumnya, diikuti dengan Kota Tangerang sebesar 4,37 triliun rupiah meningkat sebesar 1,93%, selanjutnya Kota Tangerang Selatan sebesar 3,63 triliun rupiah meningkat sebesar 11,1%, Kabupaten Serang sebesar 3,2 triliun rupiah meningkat sebesar 6,82%, Kabupaten Lebak sebesar 2,65 triliun rupiah meningkat sebesar 8,64%, Kabupaten Pandeglang sebesar 2,59 triliun rupiah meningkat sebesar 5,66%, Kota Cilegon sebesar 1,82 triliun rupiah meningkat sebesar 14,6%, Kota Serang Sebesar 1,33 triliun rupiah meningkat sebesar 8,75%. Kawasan

Rifky Ramadhani, 2022

PENGARUH PAJAK DAERAH, JUMLAH PENDUDUK, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI BANTEN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

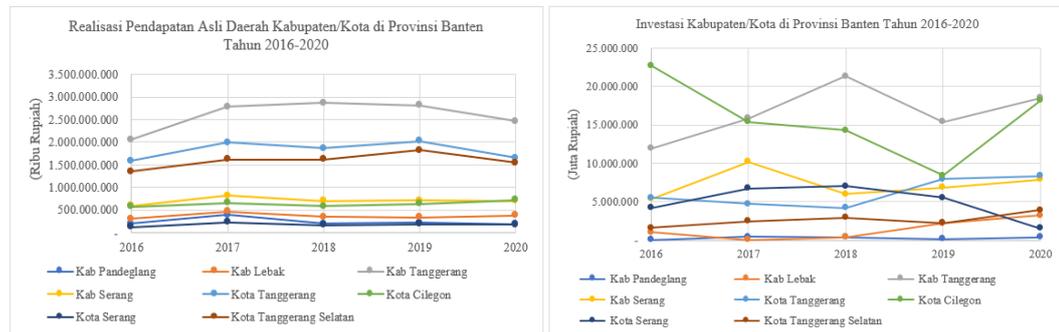
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Tangerang Raya (Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang) memiliki jumlah pengeluaran terbesar pada Provinsi Banten yang mana hal tersebut sesuai dengan realisasi pendapatan daerah yang besar pada masing-masing daerah tersebut. Pada wilayah lainnya seperti Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon dan Kota Serang memang mengalami peningkatan realisasi belanja daerah akan tetapi sumber dana masih didominasi oleh dana transfer pemerintah pusat dikarenakan PAD yang dimiliki daerah tersebut relatif kecil dan belum mampu untuk membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri (BI, 2019).

Pengeluaran pemerintah yang meningkat tidak selalu meningkatkan pendapatan PAD, pengeluaran pemerintah pada Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2018, namun jika diukur dengan realisasi penerimaan PAD-nya pada 3 Kota dan Kabupaten tersebut mengalami penurunan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari realisasi belanja modal dan belanja barang dan jasa yang lebih kecil dibandingkan dengan belanja pegawai. Hal ini menyebabkan kebijakan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik serta *multiplier effect* pada perekonomian daerah berjalan lambat serta membuktikan pemerintah daerah masih berfokus kepada masalah administrasi, dan belum memanfaatkan pada pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur (Kemenkeu, 2018).

Menurut teori pertumbuhan Harrod dan Domar, investasi dicirikan sebagai perubahan jumlah modal (*stock*) dalam perekonomian sebagai akibat dari sebagian pendapatan yang disisihkan untuk ditabung. Arah arus tabungan dimaksudkan untuk menghasilkan uang investasi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Bagi negara-negara berkembang, investasi dapat memacu kegiatan ekonomi dengan menghasilkan kegiatan produksi, membuka kesempatan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan hingga akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Grafik 5. Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2020

Pada grafik 5 (lima), menjabarkan bahwa investasi Kab/Kota di Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 nominal investasi PMDN terbesar berada pada Kabupaten Tangerang dengan nilai nominal mencapai 5,06 triliun rupiah, diikuti oleh Cilegon dengan nilai 1,05 triliun rupiah, serta Kota Tangerang Selatan senilai 657 miliar rupiah, adapun PMA terbesar berada pada Kabupaten Tangerang dengan nilai nominal mencapai USD 220 juta, diikuti oleh Kota Serang dengan nilai USD 152 juta, serta Kota Cilegon dengan nilai USD 113 juta. Berdasarkan sektor usaha, sektor listrik, gas, dan air, industri makanan, barang kimia dan farmasi, industri kimia dasar, serta industri karet merupakan target investasi yang masuk pada Kabupaten Tangerang. Investasi di Kota Tangerang Selatan ditargetkan pada sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi, sektor hotel dan restoran, serta sektor perdagangan dan reparasi. Investasi di Kota Cilegon ditargetkan untuk industri kimia dasar, industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik, barang kimia dan farmasi, serta sektor listrik, gas dan air (BI, 2019).

Pada grafik tersebut juga menggambarkan bahwa pengembangan investasi di masing-masing wilayah Banten masih belum konsisten dan timpang. Peningkatan investasi tidak selalu berdampak pada peningkatan penerimaan PAD, pada tahun 2018 terjadi peningkatan investasi pada 2 (dua) daerah yakni Kabupaten Lebak dan Kota Serang. Ditahun yang sama pada 2 (dua) daerah tersebut penerimaan PAD mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan oleh investasi yang masuk pada 2 (dua) daerah tersebut belum dimaksimalkan pada sektor industri padat karya. Sedangkan investasi pada usaha padat karya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan

menurunkan angka pengangguran, yang tentunya akan berpengaruh pada naik atau turunnya pendapatan PAD (Wadjaudje et al., 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten”.

I.2 Perumusan Masalah

Provinsi Banten yang merupakan daerah perluasan dari daerah Jawa Barat memiliki PAD terendah ke 2 (dua) di pulau Jawa, yang mana PAD merupakan kunci dalam pembiayaan dalam menjalankan pemerintahan setiap daerah. Di 5 (lima) Kab/Kota di Provinsi Banten (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon), rasio kemandirian keuangan daerah masih memberikan kontribusi kurang dari rasio kemandirian rata-rata seluruh provinsi sebesar 79,10%. Hal ini menunjukkan bagaimana kota atau daerah masih bergantung pada pemerintah pusat untuk pendanaan keuangan daerah. Rendahnya realisasi pendapatan PAD disebabkan oleh sejumlah masalah, termasuk pajak daerah, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan investasi.

Adapun perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Banten?
- b. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Banten?
- c. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Banten?
- d. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Banten?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah, timbulah tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Banten.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Banten.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Banten.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh investasi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Banten.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan kita tentang bagaimana pendapatan asli daerah di Provinsi Banten dipengaruhi oleh pajak daerah, kependudukan, pengeluaran pemerintah, dan investasi.
 - 2) Kajian ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi kajian-kajian selanjutnya yang mengkaji dampak pendapatan asli daerah di Provinsi Banten terhadap pajak daerah, kependudukan, belanja pemerintah, dan investasi.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Peneliti

Memberi tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pajak daerah, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi tempat untuk dapat mengaplikasikan pemikiran atau teori-teori yang di peroleh.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai sumbangan pemikiran dan saran kepada pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ke depan dalam menghasilkan dan meningkatkan pendapatan daerah, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Banten secara adil dan merata.

3) Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan literatur, terutama untuk menyelidiki tema yang sama yang disebutkan dalam penelitian ini.